

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA PEGAWAI

Muhammad Ridho Akbar<sup>1</sup>, Henni Indriyani<sup>2</sup>, Septiani Fransisca<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma

[ridhoakbar11@yahoo.com](mailto:ridhoakbar11@yahoo.com)<sup>1</sup>

[henniinayah@yahoo.com](mailto:henniinayah@yahoo.com)<sup>2</sup>

[Septiani.Fransisca@binadarma.ac.id](mailto:Septiani.Fransisca@binadarma.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrack

*Percentage of the servant expenditure against to total local expenditure in District/Municipality Province of South Sumatera from 2011 until 2014 amount 60 %. This case indicate that the most absorption of expenditure allocation in servant expenditure. Based on this data, this research aimed to give empirical edivence about this influences Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fund (DAK) the servant expenditure allocation. The reserach method use quantitative method with linear regression analysis. The secondary data is used in this research consist PAD, DAU, DBH, DAK, and servant expenditure. The analysis result show that PAD and DBH have positive influence and significantly against to the servent expenditure in  $\alpha = 5\%$  whreas, analysis result of DAU and DAK show that it have no significant influence against to the servant expenditure budgeting. This research conclusion is PAD and DBH give influence against to the servant expenditure to district/municipality area in Province of South Sumatera.*

**Keywords:** *Local Revenue, General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Special Allcoation Fund and Servent Expenditure.*

### 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan kekhususan serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah.

Potensi daerah seperti dari Sektor Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada di daerah tersebut. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut maka pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran untuk Belanja Pegawai, sumber-sumber dana yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satu sektor yang paling Dominan yang ada di setiap daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.2

Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Sumatera Selatan 2010-2014

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja Daerah	Persentase
2011	7.577.804	13.701.480	55,3. %
2012	9.239.778	15.872.712	58,2 %
2013	11.805.736	19.771.436	59,7 %
2014	14.886.140	24.267.081	61,7 %

Sumber : hasil olah data

Tabel 1.2 terlihat bahwa perbandingan antara Belanja Pegawai dengan total belanja daerah yang semakin meningkat. Meningkatnya alokasi belanja pegawai dikarenakan jumlah pegawai pemerintahan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintahan beranggapan dengan menambah jumlah pegawai pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, namun peningkatan alokasi belanja pegawai tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fenomena Belanja pegawai juga terdapat pada kasus pemekaran daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Pemekaran daerah seharusnya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat dan tidak menambah inefisiensi biaya birokrasi lokal. Pada prakteknya, pemekaran daerah dapat menambah pengeluaran pada daerah otonom terutama alokasi belanja pegawai dari dana perimbangan

Berdasarkan Uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Belanja Pegawai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan”.

## 2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1 Teori Keagenan

Dalam sudut pandang keagenan sektor publik, legislatif yaitu DPRD berperan sebagai pihak prinsipal dan eksekutif yaitu pemerintah daerah berperan sebagai agen. Berdasarkan program yang akan dijalankan pemda akan menyusun anggaran daerah. Sebagai pelayanan kepada publik, legislatif yaitu DPRD berperan sebagai agen sedangkan publik yaitu masyarakat berperan sebagai prinsipal. Sebagai perwakilan yang dipercaya masyarakat dapat menjalankan tugasnya dalam mensejahterakan rakyat dan mengembangkan daerahnya yaitu legislatif bertindak berdasarkan keinginan rakyat dan rakyat memantau kinerja dari legislatif. Legislatif akan menjadi agen ketika berhubungan dengan publik tetapi disisi lain legislatif akan menjadi prinsipal. Jadi legislatif mendapatkan tugas dari publik sebagai agen dan akan memantau kinerja pemda melalui anggaran sebagai pihak principal.

### 2.2 Belanja Pegawai, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintahan daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan (KSAP, 2010:34). Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2011:23). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014, dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana bagi hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil sumber daya alam. Dana alokasi khusus menurut UU. No 23 tahun 2014 merupakan Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah tertentu dan sesuai dengan prioritas nasional,

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

#### 2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Besarnya Kewenangan legislatif (*principal*) dalam proses penyusunan anggaran ( Undang-undang No.23/2014) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan pribadinya. Studi Abdullah (2010) dalam Darwanto (2011), mengemukakan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* Pendapatan Asli Daerah ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami penurunan. Abdullah (2010) dalam Darwanto (2011), menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* Pendapatan Asli Daerah. *Spread* Pendapatan Asli Daerah merupakan selisih hasil dari pengalokasian daerah untuk pendidikan dan kesehatan terhadap belanja daerah. Berdasarkan landasan teoritis dan temuan-temuan empiris diatas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut :

**H1 :Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi realisasi Belanja pegawai**

#### 2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kurnia dan sulistyowati (2010) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pegawai. Secara spesifik mereka menegaskan variabel – variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima. Sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan symmetric .Berdasarkan Landasan teoritis dan temuan – temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja pegawai**

#### 2.3.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Pegawai

Dana Bagi Hasil adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Deddi, 2009:45).

Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2010): menyatakan bahwa Pendapatan Asli daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana bagi hasil secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap belanja pegawai di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Landasan Landasan teoritis dan temuan diatas maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

**H3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh Positif terhadap alokasi belanja Pegawai**

#### 2.3.4 Pengaruh Dana alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Pegawai

DAK bertujuan untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Askam tuasikal (2011) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Pendapatan Asli daerah (PAD), Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap belanja langsung pada Pemerintah kabupaten di indonesia, Secara simultan DAU, DAK, PAD, PDRB berpengaruh positif terhadap belanja langsung Pemerintah kabupaten di indonesia. Kedua secara parsial DAU, DAK, PAD, berpengaruh terhadap belanja langsung sedangkan PDRB tidak berpengaruh positif terhadap belanja langsung pemerintah provinsi di indonesia. Berdasarkan Landasan Landasan teoritis dan temuan diatas maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

**H4: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai**

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

#### 3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini dikumpulkan dari sumber – sumber tercetak, dimana data itu telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi APBD yang diperoleh BPS (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan).

#### 3.3 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik analisis kuantitatif.

##### 3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptifkan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku atau generalisasi (Sugiyono, 2012)

##### 3.3.2 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas perlu dilakukan untuk menentukan alat statistik yang dilakukan, sehingga kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

##### 3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas

Gejala Heteroskedastisitas diuji dengan metode Gletser dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing – masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap absolut residual ( $\alpha = 0,05$ ) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

##### 3.3.4 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama yang lainnya.

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan pengujian Durbin- Watson ( $d$ ). Hasil perhitungan Durbin – Watson ( $d$ ) dibandingkan dengan nilai  $d_{tabel}$  pada  $\alpha = 0,05$ . Table  $d$  memiliki dua nilai, yaitu nilai batas atas ( $d_U$ ) dan nilai batas bawah ( $d_L$ ) untuk berbagai nilai  $n$  dan  $k$ .

Jika  $d < d_L$  ; maka terjadi autokorelasi positif

$d > 4 - d_L$  ; maka terjadi autokorelasi negatif

$d_U < d < 4 - d_U$  ; maka tidak terjadi autokorelasi

$d_L \leq d \leq d_U$  atau  $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$  ; maka pengujian tidak meyakinkan

##### 3.3.5 Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar Variabel bebas (independen) . Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel independen yang menilai korelasi anatar sesama variabel independen sama dengan nil (Ghozali, 2010, 65).

Pendeteksian terhadap multikolonieritas dapat dilakukan dengan nilai *variance Inflating Factor* (VIF) dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF > 10 maka terdapat gejala multikolonieritas yang tinggi.

### 3.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesia ( $H_a$ ) metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, karena menyangkut lima variabel independen dan satu buah variabel dependen. Model persamaan regresi untuk menguji hipotesis dengan formulasi berikut ini:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Pegawai

a = Konstanta

X1 = Pendapatan Asli daerah

X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)

X3 = Dana Bagi Hasil (DBH)

X4 = Dana Alokasi Khusus (DAK)

b1 = Koefisien Regresi Pendapatan Asli Daerah

b2 = Koefisien Regresi Dana Alokasi Umum

b3 = Koefisien Regresi Dana Bagi Hasil

b4 = Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus

e = Standar Error (pengganggu)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3660,052	7479,429		,489	,627
Pendapatan Asli Daerah	,115	,032	,370	3,597	,001
Dana Alokasi Umum	-,008	,020	-,048	-,407	,686
Dana Bagi Hasil	,060	,005	,750	11,100	,000
Dana Alokasi Khusus	,222	,117	,161	1,897	,063

Sumber : hasil output spss

### 4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pegawai

Dari Tabel diatas yang telah dilakukan membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang diperoleh pemerintah provinsi sumatera selatan akan meningkatkan alokasi belanja pegawai. Hal ini terbukti semakin banyak PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung dari pusat, Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki dan akan mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Hal ini sesuai dengan perspektif teori keagenan dimana terdapat hubungan *spread* PAD antara pihak eksekutif dan legislatif untuk memprioritaskan preferensinya dalam penganggaran.

Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, dimana posisi legislatif sebagai *principal* dan pihak eksekutif sebagai agen sehingga akan mempengaruhi pihak eksekutif untuk menaikkan alokasi anggaran ke sektor-sektor yang mendukung kepentingannya yaitu dengan meningkatkan alokasi belanja pegawai Dengan demikian hipotesis PAD berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.

#### 4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pegawai

Berdasarkan tabel diatas yang telah dilakukan tidak membuktikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengalokasian belanja pegawai akan semakin besar. Alasan DAU tidak berpengaruh terhadap pengalokasian belanja pegawai karena DAU merupakan dana transfer yang bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai prioritas daerah dan jumlah yang dialokasikan pun tidak terlalu besar sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian belanja pegawai. DAU juga dialokasikan kepada daerah tanpa memperhatikan jumlah pegawai yang telah sepenuhnya menjadi beban daerah, baik pegawai yang telah berstatus sebagai pegawai pemerintah pusat yang dialihkan kepada daerah yang sepenuhnya menjadi beban daerah..Jadi, hasil analisis ini menolak hipotesis bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai.

#### 4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai

Berdasarkan Tabel diatas yang dilakukan telah membuktikan bahwa semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diperoleh Pemerintah daerah akan menetapkan Belanja Pegawai yang besar jika anggaran Dana Bagi Hasil besar, sebaliknya jika kecil Belanja Pegawai yang akan ditetapkan jika anggaran Dana Bagi Hasil kecil. Dana Bagi hasil juga merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran dan Belanja daerah.Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil.Pemerintah Daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat memuhi belanja pegawai dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran khususnya mengenai belanja pegawai.Dengan demikian hipotesis DBH berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.

#### 4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai

Berdasarkan Tabel diatas yang telah dilakukan membuktikan DAK berpengaruh positif terhadap belanja pegawai. Hal ini disebabkan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang dimaksud adalah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan, kesehatan, inftasturktur, prasarana pemerintahan kelautan dan perikanan. Pemerintah pusat memebrikan Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mensejahterakan masyarakat misalnya dengan menambah jumlah guru di kabupaten yang masih memerlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menambah akses layanan umum sepeti Rumah sakit dan menambah jumlah dokter untuk kabupaten yang masih kekurangan tenaga medis.Dengan demikian hipotesis DAK berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja pegawai diterima.



## 5. SIMPULAN

### 5.1 Simpulan

Hasil Pengujian Hipotesis pertama, ketiga dan Keempat menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil Pengujian Hipotesis kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai

### 5.2 Saran

Sebaiknya pemerintah daerah lebih meningkatkan Pendapatan Asli daerah dengan cara lebih mengoptimalkan dalam memanfaatkan kekayaan daerah dan menggali potensi sumber daya alam yang ada, begitu juga dengan Dana Bagi Hasil dan Dana alokasi khusus yang diterima pemerintah. Namun demikian, dalam jangka panjang ketergantungan semacam ini harus semakin kecil. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mandiri dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya untuk dapat membiayai belanja pegawai dan tidak tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai setiap pengeluaran khususnya mengenai belanja pegawai. Bagi Peneliti selanjutnya agar dapat memperbanyak jumlah sampel, menggunakan sektor-sektor lain sebagai objek penelitian dan menambahkan variabel-variabel lainnya., seperti Derajat desentralisasi, Luas Wilayah dan Pendapatan lain-lain. Peneliti selanjutnya disarankan agar memperluas periode pengamatan agar lebih akurat dalam membandingkan hasil penelitian dari tahun ke tahun.

## 6. REFERENSI

- [1] Diah, Retno. 2011. *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK terhadap alokasi belanja daerah: studi kasus pemerintah provinsi se indonesia. Jurnal akuntansi*. Vol2, no 2.
- [2] Herniati, Ayungnityas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi ke-2*. Jakarta : Salemba Empat.
- [3] Kalangi, Bintang Josep. 2011. *Statistika ekonomi dan bisnis. Jakarata : Penerbit Salemba empat*.
- [4] Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi peneltiian dan bisnis untuk akuntansi. Jakarta : Penerbit Salemba Empat*.
- [5] Sugiono. 2013. *Metode Penelian Kuantitatif dan Kualitatif ekonomi. Jakarta : Penerbit ALFABETA*
- [6] \_\_\_\_\_ . 2014. *Undang-undang No.23 tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- [7] \_\_\_\_\_ . 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [8] \_\_\_\_\_ . 2009. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil*.